

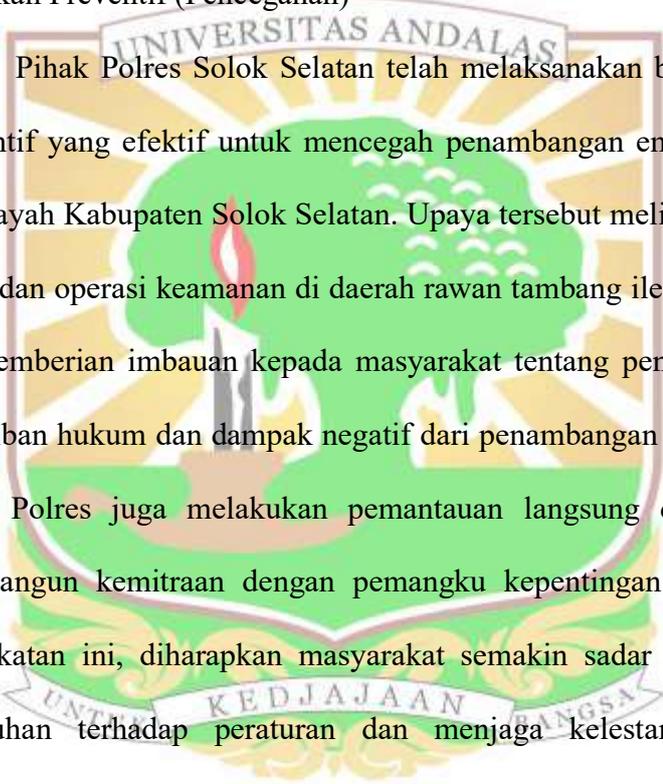
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Satuan Reskrim Polres Solok Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Polres Solok Selatan, penegakan hukum kepada pelaku Pertambangan emas tanpa izin (PETI) telah dilakukan upaya penegakan hukum sebagai berikut:

a. Tindakan Preventif (Pencegahan)



Pihak Polres Solok Selatan telah melaksanakan berbagai tindakan preventif yang efektif untuk mencegah penambangan emas ilegal (PETI) di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Upaya tersebut meliputi patroli rutin, razia, dan operasi keamanan di daerah rawan tambang ilegal, serta edukasi dan pemberian imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban hukum dan dampak negatif dari penambangan ilegal. Selain itu, pihak Polres juga melakukan pemantauan langsung di lapangan dan membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga praktik penambangan ilegal dapat berkurang secara signifikan.

b. Tindakan Represif (Penindakan)

Polres Solok Selatan telah mengambil langkah represif yang tegas terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI). Tindakan ini meliputi laporan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penyitaan barang bukti yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Meskipun beberapa kasus berhasil

diungkap, tantangan tetap ada akibat bocornya informasi razia dan medan yang sulit dijangkau. Penegakan hukum dilakukan dengan memberikan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang memberikan hukuman berat kepada pelaku PETI guna menekan praktik ilegal dan melindungi lingkungan.

2. Faktor penghambat satuan reskrim polres Solok Selatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Polres Solok Selatan secara umum hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Solok Selatan terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin adalah:

a. Hambatan Internal

Polres Solok Selatan menghadapi beberapa hambatan internal dalam penegakan hukum terhadap tambang emas ilegal, yaitu kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan terbatasnya sarana serta prasarana pendukung. Kekurangan personil yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus kejahatan lingkungan membuat penegakan hukum menjadi terhambat, sementara keterbatasan peralatan dan teknologi, seperti laboratorium forensik yang tidak tersedia di wilayah tersebut, memperlambat proses penyidikan. Selain itu, aksesibilitas yang sulit ke lokasi tambang ilegal di daerah terpencil, serta infrastruktur komunikasi yang kurang memadai, juga menjadi faktor penghambat dalam pengawasan dan koordinasi yang efektif antara aparat di lapangan dan pusat. Semua hambatan ini membuat upaya pemberantasan tambang ilegal di Kabupaten Solok Selatan menjadi lebih menantang.

b. Hambatan Eksternal

Polres Solok Selatan menghadapi sejumlah hambatan eksternal dalam penegakan hukum terhadap tambang emas ilegal, yaitu terbatasnya dukungan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tambang ilegal, kurangnya kerja sama antar lembaga terkait, serta dinamika sosial dan budaya lokal yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap praktik tambang. Masyarakat sering kali tidak melihat alternatif ekonomi yang cukup, sementara kurangnya koordinasi antara kepolisian dan lembaga lain seperti ESDM dan Badan Lingkungan Hidup membuat penegakan hukum menjadi terhambat. Selain itu, ketidapahaman aparat terhadap nilai sosial dan budaya lokal mengarah pada pendekatan yang tidak sensitif, berisiko menimbulkan konflik sosial dan perlawanan dari masyarakat. Hal ini menjadikan pemberantasan tambang ilegal lebih kompleks dan sulit dilaksanakan secara efektif.

3. Upaya dari Polres Solok Selatan terhadap maraknya pertambangan ilegal di wilayah Polres Solok Selatan, Polres Solok Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi maraknya pertambangan ilegal di wilayahnya dengan meningkatkan integritas anggota polisi melalui pelatihan, pengawasan ketat, dan transparansi dalam penegakan hukum. Selain itu, pihak kepolisian juga menegakkan hukum dengan tegas dan konsisten terhadap pelanggar, serta meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan pertambangan secara legal dan aman. Polres Solok Selatan juga memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin dan menggandeng berbagai pihak terkait seperti Dinas ESDM dan Badan Lingkungan Hidup untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh. Semua

langkah ini bertujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang kredibel, efektif, dan berkelanjutan dalam memberantas aktivitas pertambangan ilegal.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Solok Selatan adalah dengan memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Selain itu, perlu adanya peningkatan pemantauan dan pengawasan menggunakan teknologi, seperti drone atau perangkat GPS, untuk mengatasi kendala medan yang sulit dijangkau dan mencegah bocornya informasi tentang razia. Peningkatan kemampuan aparat dalam mengidentifikasi dan menangani kasus secara cepat dan tepat, serta memperkuat sistem komunikasi antar lembaga terkait, dapat mempercepat respons dan mencegah pelaku melarikan diri. Di samping itu, meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pertambangan ilegal dan memberikan alternatif ekonomi yang lebih berkelanjutan juga penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kegiatan ilegal tersebut.
2. Mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Polres Solok Selatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal adalah dengan memperkuat kolaborasi antar lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kementerian ESDM, Badan Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah. Hal ini dapat menciptakan pendekatan yang lebih terintegrasi dan sinergis dalam menangani masalah pertambangan ilegal. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap instansi, baik dalam hal pengetahuan hukum, sosial budaya, maupun teknik pengawasan, agar dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan lokal. Peningkatan sarana dan prasarana, seperti

peralatan forensik dan infrastruktur komunikasi, juga sangat penting untuk mendukung proses penegakan hukum yang lebih cepat dan efisien. Terakhir, membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal melalui edukasi mengenai dampak negatif tambang ilegal dan menyediakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.

3. Untuk memperkuat upaya Polres Solok Selatan dalam mengatasi maraknya pertambangan ilegal adalah dengan meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan dialog rutin antara pihak kepolisian dan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta mematuhi hukum pertambangan. Selain itu, perlu adanya penguatan kapasitas teknis, seperti penyediaan peralatan dan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi dan menangani aktivitas ilegal secara lebih efisien. Peningkatan kolaborasi antara Polres Solok Selatan dan instansi terkait lainnya, seperti Dinas ESDM dan Badan Lingkungan Hidup, juga harus lebih diperkuat untuk memastikan pengawasan yang holistik dan sinergis. Selain itu, pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pemahaman sosial budaya lokal perlu diterapkan agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketegangan sosial dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.